



Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)

Siti Amerieska

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

Alamat e-mail: siti.amerieska@polinema.ac.id

Fita Setiati

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

Imam Mulyono

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

Abstract

This study aims to analyze the factors of management of regional property. This research was conducted by using quantitative descriptive method. The analysis technique used is factor analysis. Based on the results of the data analysis test, about 33 factors had been explored in asset management in the local government environment. The sample uses 50 respondents, data analysis techniques using factor analysis in this research data are grouped into 6 (six) factors, namely: BMD Planning and Procurement (20.71%), Usage and Utilization (18.12%), Security and Maintenance (10.05%), Elimination (6.29%), Administration of BMD (5.00%) and Control and Control (4.89%). The results of this study indicate that of the six factors the most dominant factors are the factors of procurement BMD and BMD, in which this fact is reasonable because planning is very important as a phase of management to support the control and supervision process. While other factors such as a use and utilization of asset could be more effective if supported by good administration and periodic maintenance.

Keywords: Regional Property (BMD), Effectiveness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor - faktor pengelolaan barang milik Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis faktor. Berdasarkan hasil uji analisa data maka didapatkan bahwa pengujian terhadap 33 faktor yang dalam pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah. Sampel menggunakan 50 responden, teknik analisis data menggunakan analisis faktor dalam data penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 (enam) faktor yaitu :Perencanaan dan Pengadaan BMD (20,71%), Penggunaan dan Pemanfaatan (18,12%), Pengamanan dan Pemeliharaan (10,05%), Penghapusan (6,29%), Penatausahaan BMD (5,00%) dan Pengawasan dan Pengendalian (4,89%). Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari keenam faktor tersebut faktor yang paling dominan adalah faktor perencanaan - pengadaan BMD dan penggunaan - pemanfaatan BMD. Hal ini dikarenakan perencanaan sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sementara penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala.



Kata Kunci: Barang milik Daerah, Efektivitas

I. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, sosial, maupun politik. Bagi pengguna informasi akuntansi, nilai BMD/aset yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah akan digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan pemerintah. Jika BMD/aset yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi atau BMD yang sudah hilang dan tidak dihapuskan namun masih tetap dilaporkan dalam laporan keuangan, maka pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut tentu tidak tepat. Berkaitan dengan BMD yang sudah rusak atau hilang, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan permasalahan tersebut adalah tindakan penghapusan BMD (Conway, et.al 2006).

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi permasalahan klasik di lingkungan Instansi Pemerintah. Ketidakpedulian atas pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan aset yang belum efektif, dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hampir setiap tahun masih didominasi oleh masalah pengelolaan BMD. Permasalahan yang sering ditemukan BPK berdasarkan elemen siklus pengelolaan BMD antara lain: 1) belum komprehensifnya kerangka kebijakan, 2) persepsi tradisional yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah, 3) inefisiensi, 4) keterbatasan data, 5) keterbatasan SDM (Mardiasmo, et.al 2012).

Mengingat pentingnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi pemerintah daerah serta besarnya pengeluaran Negara terkait dengan pengelolaan BMD tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan pengelolaan aset/ barang milik daerah secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan BMD sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Permasalahan aset menjadi permasalahan yang harus segera diatasi, dimana aset Negara maupun daerah adalah tanggung jawab bersama pemerintah selaku pengelola dan masyarakat sebagai stakeholder (Kaganova & Mckelllar 2006).

A. Rumusan Masalah

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terdiri dari beberapa faktor-faktor penunjang keberhasilan pengelolaan BMD. Jika faktor-faktor tersebut diketahui secara tepat, maka pihak pengelola aset dapat mengelola BMD secara efektif. Yang menjadi permasalahan adalah seberapa besar tingkat efektivitas faktor-faktor pengelolaan BMD. Tiap faktor terdiri dari beberapa variabel yang dapat dieksplorasi untuk mengetahui seberapa efektif mengelola BMD.

B. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan BMD. Secara khusus yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor



pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan pengelolaan BMD

C. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terdapat dua belas unsur dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:

a. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

- 1) Perencanaan pengadaan barang milik daerah.
- 2) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah.
- 3) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- 4) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah.
- 5) Perencanaan penghapusan barang milik daerah.

b. Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan (Mardiasmo 2012)

c. Penggunaan

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan secara tahunan. Penggunaan barang milik daerah meliputi:

- 1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- 2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- 3) Penggunaan sementara barang milik daerah.
- 4) Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.



Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

1) Sewa

Barang milik daerah yang dapat disewakan berupa:

- a) Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- b) Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang.
- c) Selain tanah dan/atau bangunan.

2) Pinjam pakai

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah rangka penyelenggara pemerintah. Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa sebagian atau keseluruhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berbeda pada pengelola barang/pengguna barang.

3) KSP (Kerja Sama Pemanfaatan)

KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan. Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi:

- a) Badan usaha milik negara
- b) Badan usaha milik daerah
- c) Swasta, kecuali perorangan.

4) BGS (Barang Guna Serah) atau BSG (Barang Serah Guna)

Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah pengelola barang. Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta kecuali perorangan, dan/atau badan hukum lainnya. Objek BGS/BSG meliputi:

- a) Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengelola barang.
- b) Barang milik daerah berupa tanah berada pada pengguna barang.

5) KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur)

Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:

- a) Tanah dan/atau bangunan.
- b) Sebagian tanah dan/atau bangunan masih digunakan.
- c) Selain tanah dan/atau bangunan.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan barang milik daerah meliputi:

1) Pengamanan fisik

Pengamanan fisik pada tanah dilakukan dengan memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan. Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan cara membangun pagar pembatas, memasang tanda kepemilikan, melakukan tindakan antisipasi, pemasangan closed-circuit television (CCTV), dan



menyediakan satuan pengamanan. Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.

2) Pengamanan administrasi

Pengamanan administrasi pada tanah dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman. Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen. Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen.

3) Pengamanan hukum

Pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat, tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan dengan cara melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), dan mengusulkan penetapan status penggunaan. Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan dengan melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan dinas bermotor.

Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang. Pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

f. Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai pemerintah, atau penilai publik yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

g. Pemindahtanganan

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggara tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangkan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.

h. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangkan serta terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penghapusan

Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang pengelola, dan penghapusan dari daftar barang milik daerah.

j. Penatausahaan

Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya kedalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pengguna barang/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status



penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang kedalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit satu kali dalam lima tahun, sedangkan untuk persediaan dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun. Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

Kuasa pengguna barang harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang. Pengelola barang harus menyusun laporan barang pengelola semesteran dan laporan barang pengelola tahunan.

k. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pengawasan dan pengendalian pengelola barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban serta pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

l. Ganti rugi dan sanksi

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hipotesis

Faktor perencanaan BMD sangatlah penting dilakukan sebagai pengendalian atas pengeluaran yang tidak efisien. Penggunaan dan pemanfaatan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi pengelola Barang Milik Daerah, karena permasalahan yang sering terjadi bahwa penggunaan dan pemanfaatan tidak digunakan sesuai prosedur (Haris et al., 2011).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan tinjauan teori yang sudah dipaparkan, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Faktor perencanaan BMD, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan dan pengawasan merupakan faktor yang menimbulkan efektifitas pengelolaan BMD
- b. Faktor Penggunaan dan Pemanfaatan merupakan faktor-faktor yang paling dominan yang berarti penting dalam mencerminkan efektifitas pengelolaan BMD

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain eksploratorik. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah. Untuk sampel penelitian ini yaitu Kuasa Pengguna Barang (KPB), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPTk), Kassubag Umum dan Logistik, Pegawai pada Bagian Umum dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Malang yang mengelola Barang Milik Negara.

Data primer yang digunakan yaitu berasal dari hasil wawancara yang dilakukan pada Kuasa Pengguna Barang (KPB), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPTk), Kassubag Umum dan Logistik, Pegawai pada Bagian Umum dan Logistik dan observasi lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan barang milik Negara dari masing-masing satker. Laporan yang dimaksud yaitu Laporan Kondisi Barang Milik Negara dan Hasil Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

1. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis faktor, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan dan meringkas faktor-faktor yang merupakan dimensi suatu variabel, definisi dan sebuah fenomena tertentu.

2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Variabel

Var	Nama Variabel	Definisi Operasional
X1	Stock Opname	Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin yaitu tiap semester
X2	SBU	Patokan Biaya untuk penganggaran Barang Milik Daerah
X3	Harga	Satuan nilai yang diberikan pada Barang Milik Daerah sesuai dengan standar
X4	Tenaga Kualifikasi	Tenaga atau staf yang sudah memiliki sertifikat pengadaan
X5	Pengadaan Barang	Efisiensi, Efektifitas, transparan, terbuka, adil dan akuntabel
X6	LPSE	Sistem pelelangan secara elektronik
X7	Penggunaan Aset	Aset yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
X8	Pengelola Barang	Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah
X9	Sewa	Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
X10	SOP Pinjam Pakai	Prosedur yang digunakan untuk pinjam pakai Barang Milik Daerah
X11	Kepemilikan	Status kepemilikan Barang Milik Daerah
X12	KIB	Kartu Inventaris Barang yang dimiliki
X13	Gudang	Tempat penyimpanan Barang Milik Daerah
X14	Pemeliharaan	Upaya pencegahan kerusakan pada Barang Milik Daerah
X15	Daftar Pemeliharaan	Rincian aset yang telah dilakukan pemeliharaan
X16	Laporan	Satker selalu menyampaikan hasil pemeliharaan secara berkala kepada Kuasa Pengguna Barang
X17	SOP Penyelesaian Kasus	Prosedur untuk penanganan kasus yang berhubungan dengan kehilangan, penyerobotan barang milik negara
X18	KPKNL	Tim penilai Barang Milik Daerah
X19	Depresiasi	Penyusutan atau penurunan nilai
X20	Pemanfaatan	Penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peruntukan
X21	Penghapusan	Aset yang telah di keluarkan dari daftar barang
X22	Surat Keputusan	Dasar hukum penggunaan dan penghapusan aset
X23	SOP Penghapusan	Prosedur yang digunakan untuk proses penghapusan barang milik daerah
X24	Persetujuan Penghapusan	Persetujuan dari DJKN atas usulan aset/barang yang akan dihapus
X25	Pelelangan	Aset/barang yang akan dilakukan proses pelelangan
X26	Inventaris	Daftar semua fasilitas yang ada di seluruh bagian, termasuk gedung dan isinya
X27	Registrasi	Pencatatan aset kedalam aplikasi dengan detail

X28	Penggolongan Barang	Pencatatan aset sesuai dengan kategori dari masing-masing aset yang telah diregistrasi
X29	Pelaporan	Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan secara berkala dan berjenjang
X30	Bimtek	Pengelola Barang Milik Daerah secara rutin mengikuti Pelatihan Barang Milik Daerah
X31	Monev	Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan aset di masing-masing satuan kerja
X32	Tupoksi	Uraian tugas dan wewenang penggunaan barang
X33	Tindak Lanjut LHP	Tindak lanjut atas temuan pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Satuan kerja

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu teknik analisis faktor

III. Hasil dan Pembahasan

1. Penilaian Variabel Yang Layak

Dari hasil output program SPSS untuk data 33 pertanyaan yang dijawab oleh 50, didapatkan hasil sebagai berikut:

KMO and Bartlett's test. Hasil output menunjukkan angka KMO and Bartlett's test adalah 0,785 adalah diatas 0,5 dengan signifikansi 0,000 adalah dibawah 0,05 maka variabel dan sampel telah layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 2. Output bagian KMO and Bartletts Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy	,620
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi.Square
	df
	Sig.
	81,294
	10
	,000

Dari table KMO and Bartlett's Test didapat nilai KMO sebesar 0,620. Ini berarti bahwa analisis Faktor cukup tepat untuk menganalisis untuk menganalisis matrix data yang bersangkutan.

2. Factoring dan rotasi

Analisis communalities. Dilakukan untuk mengetahui variabel yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. Bisa juga disebut proporsi atau bagian dari varian yang dijelaskan oleh common factor atau besarnya sumbangan suatu faktor terhadap varian seluruh variabel.

Tabel 3: Output bagian Communalities

Faktor	Initial	Extraction	Faktor	Initial	Extraction	Faktor	Initial	Extraction
1	1,000	,925	12	1,000	,311	23	1,000	,634
2	1,000	,764	13	1,000	,554	24	1,000	,578
3	1,000	,844	14	1,000	,724	25	1,000	,619
4	1,000	,794	15	1,000	,458	26	1,000	,512
5	1,000	,851	16	1,000	,621	27	1,000	,627
6	1,000	,734	17	1,000	,815	28	1,000	,711
7	1,000	,534	18	1,000	,429	29	1,000	,612
8	1,000	,276	19	1,000	,712	30	1,000	,712



9	1,000	,691	20	1,000	,694	31	1,000	,723
10	1,000	,823	21	1,000	,812	32	1,000	,483
11	1,000	,491	22	1,000	,392	33	1,000	,812

Dari tabel communalities di atas maka pada kolom Extrcation bisa dijelaskan, bahwa proporsi faktor 1 terhadap jumlah seluruh varians adalah sebesar 0,925. Demikian halnya dengan variable lainnya.

Total Variance Explained Pada lampiran 1 dari 33 variabel yang dianalisis ternyata dapat dikelompokkan menjadi 6 faktor, yaitu: faktor 1 (perencanaan dan pengadaan BMD), faktor 2, (penggunaan dan pemanfaatan BMD), faktor 3 (pengamanan dan pemeliharaan), faktor 4 (penghapusan BMD), faktor 5 (penatausahaan BMD), dan faktor 6 (pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD). Eigenvalen yang menunjukkan angka lebih besar dari satu. Dengan demikian keenam faktor tersebut dapat terbentuk.

Factor Loadings yaitu besarnya korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 5 dan faktor 6. Penentuan variabel yang masuk masing-masing faktor dilakukan dengan membandingkan besaran korelasi pada setiap angka. Angka korelasi di bawah 0,5 menunjukkan indikasi korelasi yang lemah, sedangkan di atas 0,5 berindikasi memiliki korelasi yang tinggi.

Rotated Component Matrix , hal ini perlu dilakukan untuk memperjelas variabel mana yang masuk ke dalam tiap-tiap faktor. Banyak sekali faktor loading yang berubah setelah mengalami rotasi menjadi lebih kecil. Pada matrik faktor (pada lampiran2) variabel-variabel yang masuk pada tiap-tiap faktor sebagai berikut: faktor 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6; faktor 2: X7, X8, X9, X 10, X11, X20; faktor 3: X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19; faktor 4: X21, X22, X23, X24; faktor 5: X25, X26, X27, X28, X29; faktor 6: X30, X31, X32, X33.

3. Component Transformation Matrix

Tabel 4. Transformation Matrix

Component	1	2	3	4	5	6
1	0,671	0,021	0,531	0,297	0,183	0,237
2	-0,382	0,786	0,188	0,321	0,276	-0,071
3	0,176	-0,128	-0,716	0,581	0,367	0,042
4	0,321	0,437	-0,269	0,159	-0,721	-0,356
5	0,276	0,389	-0,327	-0,463	0,073	0,687
6	0,369	0,411	-0,054	-0,441	0,521	-0,607

Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization

Dari tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pada diagonal factor (komponen) 1,2,3 dan 6 jatuh diatas angka 0,5 (0,671; 0,786; - 0,716 dan - 0,607), membuktikan bahwa keempat faktor (komponen) yang terbentuk sudah tepat karena mempunyai korelasi yang tinggi. Diagonal komponen 4 dan 5 menunjukkan angka dibawah 0,5 yang menunjukkan terdapat komponen lain pada masing – masing factor yang mempunyai korelasi cukup tinggi.

Dari analisa tersebut diatas, maka terbentuknya Faktor 1, Faktor 2 dan Faktor 3 sudah tepat karena mempunyai nilai korelasi yang tinggi. Faktor 4 dan Faktor 5 mempunyai korelasi yang rendah sehingga masih ada korelasi dengan faktor yang lain. Sedangkan Faktor 6 sekalipun mempunyai korelasi yang tinggi (faktor 6 dengan komponen 6), tetapi



mempunyai korelasi yang lebih tinggi dengan komponen 5. Dengan demikian, antara faktor 4,5 dan 6 cenderung terjadi interkorelasi.

4. Menentukan Label Faktor

Setelah faktor-faktor terbentuk, ternyata variabel-variabel yang masuk pada masing-masing faktor tidak sama dengan yang diprediksisebelumnya. Diperlukan pemberian nama label baru yang representatif bagi variabel-variabel yang masuk didalam masing-masing faktor-faktor sebagai berikut: Perencanaan dan Pengadaan BMD (20,71%), Penggunaan dan Pemanfaatan (18,12%), Pengamanan dan Pemeliharaan (10,05%), Penghapusan (6,29%), Penatausahaan BMD (5,00%) dan Pengawasan dan Pengendalian (4,89%). Jumlah varians tersebut diatas kurang dari 100%, menunjukkan masih terdapat stimuli efektifitas pengelolaan BMD sebagai faktor-faktor lain yang belum terungkap, yakni : Hukum dan kebijakan, Perilaku Organisasi.

5. Pembahasan

a. Interpretasi Faktor-faktor

Semua variabel yang masuk pada tiap-tiap faktor mempunyai korelasi positif, artinya bertambah besar bobot faktor (loading factor) yang bersangkutan bertambah besar pula keefektifan pengelolaan BMD.

b. Faktor Perencanaan dan Pengadaan BMD (20,71%), faktor perencanaan dan pengadaan BMD memiliki hal penting yang dilakukan karena mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD. Selain itu sebagai pengendalian awal atas tata kelola BMD yang efektif. Ruang lingkup dari perencanaan juga mengacu pada pengelolaan Stock Opname barang dengan faktor loading (0,532). Penentuan standar harga di dalam penyusunan anggaran BMD perlu dengan bijak dilakukan untuk meminimalisasi bentuk korupsi atas pengadaan BMD hal ini memiliki loading faktor (0,623). Kemudian pada saat proses pengadaan juga memiliki andil bahwa petugas ataupun SDM yang mengelola haruslah memiliki kompetensi yang sesuai (0,729). Ditunjang pula dengan sistem tata kelola pengadaan BMD yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas (0,519) yang diaplikasi dalam sistem elektronik E-Procurement (0,628).

c. Faktor Penggunaan dan Pemanfaatan (18,12%), faktor penggunaan dan pemanfaatan aset atau BMD dalam pelaksanaannya tidaklah mudah namun memungkinkan untuk dikelola dengan baik jika memperhatikan beberapa hal berikut ini: pertama adalah efektifitas penggunaan aset dalam artian sesuai peruntukkan dan kegunaan (0,712). Kedua pengelolaan BMD yang memiliki kejelasan pengelolaan seperti sewa, pinjam pakai, kepemilikan hal ini memiliki loading faktor (0,629). Pemanfaatan sesuai peruntukkan juga memiliki kontribusi besar dalam pengamanan dan pemanfaatan BMD, yakni sebesar 0,682).

d. Faktor Pengamanan dan Pemeliharaan (10,05%), terjadinya korupsi, dapat dilakukan karena sistem pengamanan dan pemeliharaan BMD yang kurang efektif. Keefektifan pengamanan BMD dapat dilakukan dengan berbagai cara salahsatunya adalah menginventarisir BMD ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) (0,529), tempat penyimpanan BMD juga perlu diperhitungkan (0,629) untuk mencegah kerusakan (0,717). Pemeliharaan BMD dilakukan secara berkala untuk pengendalian dan pengawasan fisik BMD (0,531), setelah dilakukan pengawasan fisik maka perlu dibuat laporan pemeliharaan secara berkala (0,619). Permasalahan kedua yang berkaitan dengan pengamanan BMD adalah kasus BMD yang hilang, bahkan berpindahtanganan secara ilegal (0,522). Apapun bentuk dari BMD setelah penggunaan dan pemanfaatan dilakukakan inventarisir apabila memungkinkan untuk dilakukan lelang sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pengelolaan BMD (0,682). Dalam



proses pemeliharaan BMD dikeluarkan sejumlah biaya berupa biaya penyusutan agar BMD terkelola dengan baik. Pemanfaatan BMD yang umur ekonomisnya sudah habis atau bahkan yang belum habis namun tidak dapat digunakan kembali dapat dilakukan dengan pencatatan atas penurunan nilai aset atas BMD tersebut(0,715).

- e. Faktor Penghapusan BMD(6,29%) Penghapusan BMD memungkinkan dilakukan apabila terjadi hal berikut: seperti BMD yang hilang fisiknya, BMD yang tidak dapat digunakan kembali namun umur ekonomisnya masih ada. Prosedur yang dilakukan atas BMD tersebut adalah dilakukannya penghapusan, berikut yang dilakukan dengan aset atau BMD dikeluarkan dalam daftar barang (0,672), dasar penggunaan dan penghapusan aset haruslah memiliki dasar kebijakan dan hukum yang jelas (0,536). Persetujuan penghapusan BMD dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran dan diverifikasi oleh pejabat berwenang yang mengelola BMD. Selanjutnya dapat dilakukan proses lelang (0,622) yang hasil lelang tersebut akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.
- f. Faktor Penatausahaan BMD (5,00%), penatausahaan aset dilakukan di semua SKPD yang mana bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan atau sistem dan prosedur pengelolaan BMD yang baik. Penatausahaan melingkupi daftar semua fasilitas di seluruh bagian (0,623). Registrasi pencatatan aset atau BMD dapat dilakukan kedalam aplikasi SIMAK-BMD (0,531). Dalam pengisian aplikasi ini digolongkan barang yang sesuai dengan kategori seperti KIB (Kartu Inventaris Barang mulai A sampai J) (0,588) setelah itu dilakukn penyusunan pelaporan penggunaan BMD (0,647).
- g. Faktor Pengawasan dan Pengendalian (4,89%), pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan BMD selama prosesnya berjalan dengan baik. Bimbingan teknis bagi SDM pengelola BMD perlu dilakukan untuk menunjang pengetahuan dan meningkatkan kinerja sehingga secara tidak langsung efektifitas pengelolaan BMD dapat dilakukan dengan baik (0,536) (Kaganova & Nayyar 2000). Monitoring dan evaluasi sangat perlu dilakukan terhadap aset yang digunakan maupun dimanfaatkan, karena seringkali apabila Monev tidak dilakukan secara berkala akan berpotensi BMD dikelola secara tidak efektif yang mengakibatkan kerusakan bahkan berpindah tangan secara ilegal (0,597). Pengawasan dan pengendalian ini haruslah dilakukan oleh SDM yang profesional yang memahami uraian tugas dan wewenang (0,721).Biasanya dilakukan oleh BPKP dan BPK selaku auditor Internal dan Eksternal. Hasil dari temuan atas pengelolaan BMD dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki pengelolaan BMD agar lebih efektif (0,721).
- h. Korelasi antara faktor-faktor efektifitas pengelolaan BMD. Pada component tranformation matrix, diagonal factor (component) 4 dan 5 adalah dibawah 0,5 yang menunjukkan bahwa korelasinya tidak cukup kuat. Faktor 4 mempunyai korelasi dengan component 3 (Faktor 4 pada component 3 korelasinya – 0,716), yang berarti Faktor4 (penghapusan BMD) mempunyai korelasi positif dengan Faktor 3 (Pengamanan dan Pemeliharaan) dan Faktor 5 mempunyai korelasi positif dengan komponen 4 (0,169), yang berarti Faktor 4 (penghapusan BMD) mempunyai korelasi positif dengan Faktor 5 (penatausahaan BMD).

Dari analisis tersebut diatas menunjukkan bahwa keefektifan pengelolaan BMD dilakukan dengan perencanaan dan pengadaan yang baik, kemudian ditunjang dengan penggunaan dan pemanfaatan yang efektif yang meliputi penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan serta dilakukan pengawasan dan pengendalian.



i. Faktor-faktor Dominan

Keenam faktor tersebut yakni faktor perencanaan dan pengadaan BMD, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan BMD, penatausahaan BMD dan Pengawasan dan pengendalian memiliki karakter yang berbeda untuk mempengaruhi keefektifan pengelolaan BMD. Dari keenam faktor tersebut faktor yang paling dominan adalah faktor perencanaan - pengadaan BMD dan penggunaan-pemanfaatan BMD, sebenarnya hal ini beralasan karena perencanaan sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sedangkan penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan arti penting dari setiap faktor yang mencerminkan efektivitas pengelolaan BMD secara berurutan adalah (1) faktor perencanaan - pengadaan BMD, (2) penggunaan dan pemanfaatan BMD, sebenarnya hal ini beralasan karena perencanaan sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sedangkan penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala.

Pengelolaan BMD yang efektif sangatlah mutlak diperlukan di seluruh pemerintah daerah guna menunjang tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah dilakukannya pemeliharaan dan pengelolaan aset yang efektif. Aspek-aspek seperti sumber daya manusia, sistem teknologi informasi untuk dapat mengintegrasikan informasi pengelolaan BMD dalam bentuk aplikasi SIMAK BMD yang menginventarisir BMD sampai dengan pelaporan penggunaan dan pemeliharaan ASET atau BMD merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang efektif.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah pengelolaan BMD terdiri dari beberapa faktor penunjang keberhasilan efektivitas pengelolaan BMD. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang kedepannya untuk melakukan pengelolaan aset selain mengacu pada faktor-faktor efektivitas pengelolaan BMD, baiknya juga mengacu pada pengendalian internal. Karena sistem pengendalian internal ini tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan BMD. Apabila dapat selaras dilakukan dengan baik maka pihak pengelola BMD dapat mengelola BMD dengan efektif. Yang menjadi masalah adalah seberapa besar tingkat efektivitas faktor pengelolaan BMD tersebut. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yang melihat faktor-faktor keberhasilan BMD hanya pada proses administratif pengelolaan BMD, harapannya peneliti selanjutnya dapat mencatumkan faktor yang lebih luas seperti perilaku organisasi, aspek sosial budaya pengelolaan BMD dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Daftar Pustaka

Conway, F., Kaganova, O., & McKellar, J. (2006). A "Composite Image" of Central Government Asset Management Reforms. *Managing government property assets: International experiences*, 125.

Hanis, M. H., Trigunaryah, B., & Susilawati, C. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government: A case study in South Sulawesi province. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), 36-47.



JIBEKA

Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia

ISSN 2620-875X (Online) ISSN 0126-1258 (Print)

<http://jurnal.stie.asia.ac.id>

Hal. 53-65

Kaganova, O., & McKellar, J. (2006). *Managing Government Property Assets: International Experiences: The Urban Insitute.*

Kaganova, O., & Nayyar-Stone, R. (2000). *Municipal real property asset management: An overview of world experience, trends and financial implications. Journal of Real Estate Portfolio Management, 6(4), 307-326. Retrieved from ProQuest Central.*

Mardiasmo, D. (2012). *State asset management reform in Indonesia : a wicked problem Dissertation/Thesis. Queensland University of Technology.*

Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sampford, C. (2012). *Why stagnant? behind the scenes in Indonesia's reformed state asset management policies.*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah (BMD)